

## EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

Oleh:

Trecy Austin\*, Ahmad Alriadho, Ibrahim Tholib, Muhammad Febrianza

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Candradimuka Palembang

\*Email Korespondensi : [trecy@stisipolcandradimuka.ac.id](mailto:trecy@stisipolcandradimuka.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori efektivitas oleh Richard M. Steers. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun yang dijadikan informan didalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Hasil dari penelitian ini menggunakan analisa fokus penelitian capaian tujuan, integrasi, adaptasi yang menunjukkan bahwa berdasarkan fokus penelitian capaian tujuan sudah baik dan rancangan tujuan sudah berhasil dan tercapai. Selanjutnya dinilai dari fokus penelitian Integrasi pensosialisasian program berjalan dengan baik karena memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana sosialisasi. dan yang terakhir fokus penelitian Adaptasi penyesuaian terhadap program dilakukan dengan baik karena pengkoordinasian terhadap polantas untuk melakukan jejaring razia kendaraan bermotor yang masih tidak taat pada pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan

*The purpose of this study was to determine the extent to which the effectiveness of the Motor Vehicle Tax Bleaching Program in Increasing Local Revenue for the Province of South Sumatra in 2021. The theory used in this research is the theory of effectiveness by Richard M. Steers. The research method used is a qualitative method. There were 8 people who were used as informants in this study. The results of this study used an analysis of the research focus on the achievement of objectives, integration, adaptation which showed that based on the research focus the objectives were good and the design objectives had been successful and achieved. Furthermore, judging from the research focus, the integration of program socialization is going well because it utilizes digitalization as a means of socialization. and finally the focus of research Adaptation adjustments to the program are carried out well because of the coordination of the traffic police to carry out a network of motor vehicle raids that are still not compliant with motor vehicle taxes.*

**Keywords:** Effectiveness, Motor Vehicle Tax Bleaching Program in South Sumatra Province

**A. PENDAHULUAN**

Penyumbang dana terbesar dalam meningkatkan pembangunan di kabupaten atau kota adalah pajak kendaraan bermotor, dikarenakan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pajak daerah yang mempunyai kemampuan untuk memberikan dana atas pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dijadikan sebagai salah satu tulang punggung atas sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dikarenakan pertumbuhan atas jumlah kendaran bermotor yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan yang dari tahun ke tahun selalu terdapat peningkatan (Efriandy et al., 2020).

Pemerintah harus melakukan berbagai cara agar bisa mencapai hasil pajak kendaraan bermotor secara baik dan lancar, masih banyak sekali wajib pajak di Indonesia belum menjadi wajib pajak patuh, seperti yang dilihat bahwa wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajibannya, maka pendapatan dari sektor ini masih belum optimal, masyarakat Indonesia harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk mendukung pembangunan di Indonesia secara terus menerus dalam untuk kesejahteraan semua masyarakat (Dewi & Jati, 2018).

Salah satu pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor yang terutang dan terutang oleh wajib

pajak sendiri yang berhak dan atas nama untuk mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut pada samsat tertentu. Maka sebagai masyarakat kita harus menyadari bahwa kita mempunyai kewajiban membayar pajak untuk menambah pendapatan daerah.

Adanya relevansi kajian dari hasil penelitian dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik, yaitu pada tahun 2017, 2018, dan 2019 sudah sangat efektif karena melebihi 100% yaitu sebesar 114,51% pada tahun 2017, sebesar 125,64% pada tahun 2018, dan sebesar 108,04% di tahun 2019 (Khoiriyah & Puspita, 2020).

Adapun hasil penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Dan Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Palembang, yaitu proses pelaksanaan pemutihan pajak pada masa pandemic tidak ada beda dengan proses pemutihan pajak sebelum pandemi, mulai dari persyaratan dan tata cara pembayaran pun masih sama dan tetap dilakukan di SAMSAT. Kedua, Pemutihan pajak dilihat dari proses pelaksanaan dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor terbilang efektif (Fajriana & Fachrunissa, 2022).

Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber utama kontribusi keuangan untuk meningkatkan pembangunan suatu kabupaten atau kota, karena pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah yang berpotensi untuk mendanai pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dijadikan sebagai salah satu andalan aliran pendapatan asli daerah (Rachman & Alkamil, 2020).

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya (Efriandy et al., 2020). Jumlah kendaraan terdata di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1  
Jumlah Kendaran Terdata di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)
Mobil Minibus	260.340
Bus	2.064
Truk	40.016
Sepeda Motor	876.474

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2022

Tabel 1 terlihat bahwa jumlah kendaraan menurut jenisnya di Provinsi Sumatera Selatan tidak sedikit, sehingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) digunakan sebagai salah satu penopang sumber PAD Provinsi Sumatera Selatan, karena pertumbuhan jumlah kendaraan

bermotor terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan dengan peningkatan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengurus pajak atas kendaraan bermotor, dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 pada Pasal 21.

Gubernur mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk menghitung dasar penetapan pajak PKB dan BBNKB kepada Direktur Bappenda dan pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan keuangan pusat dan daerah dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah salah satunya dapat dilakukan dari segi efektivitas pemungutan pajak daerah (Pertiwi et al., 2021).

Realisasi penerimaan pajak kendaraan melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah itu tidak lepas dari pengaruh program pemutihan pajak kendaraan yang sebenarnya merupakan kebijakan Gubernur Sumatera Selatan untuk meningkatkan pendapatan daerah. di bidang kendaraan, namun hanya pr

pemerintah yang terealisasi untuk kendaraan roda dua hanya (3%). Dari seluruh total roda dua yang terdata di sumsel.

Tabel 2  
Data Tunggakan PKB Jenis Roda (2)  
di Provinsi Sumatera Selatan  
Tahun Anggaran 2021

Jumlah (Unit)	Tunggakan (Rp)
850.305	885.999.303.975

Sumber: Bapenda Provinsi Sumsel, 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah kendaraan roda dua sangat tinggi karena keberadaan roda dua di Sumatera Selatan sebanyak 876.474 (unit) sedangkan jumlah kendaraan yang menunggak 850.305 (unit) Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya 26.169 (unit) jumlah kendaraan roda dua yang bayar pajak dan jumlah tersebut hanya (3%) yang terealisasi bagi pendapatan daerah.

Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam tiga tahun terakhir dilaksanakan berbeda-beda sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur. Tahun 2021 pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berlangsung tiga bulan pelaksanaan merupakan dampak positif bagi masyarakat karena masa pelaksanaan yang tidak sebentar, hal ini diharapkan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Efektivitas adalah hubungan antara hasil dan sasaran atau target yang ingin dicapai. Dikatakan efektif apabila proses operasional mencapai sasaran dari tujuan akhir kebijakan tersebut, sedangkan menurut Fajar efektifitas adalah perbandingan antara capaian dengan target yang diterima pajak daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan perpajakan (Athoriq & Irfan, 2021).

Indikator efektivitas sebagai berikut :

#### 1. Pencapaian tujuan

Keseluruhan upaya organisasi untuk mencapai tujuannya harus dipandang sebagai suatu bentuk proses. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub indeks, yaitu: Periode Program dan sasaran adalah tujuan khusus untuk mencapai tujuan organisasi (Hermawan, 2017).

#### 2. Integrasi

Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dan pengembangan program di tengah masyarakat. Integrasi menyangkut proses sosialisasi dilapangan (Hermawan, 2017).

#### 3. Adaptasi

Kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sebagai bagian dari relevansi pelaksanaan program dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.

Hasil penelitian tentang efektivitas program cuci PKB menunjukkan bahwa program pajak kendaraan bermotor provinsi Sumatera Selatan telah menyesuaikan program dengan sangat baik. Pasalnya, Ditlantas sebagai organisasi yang bermitra dengan Bappenda telah menggelar operasi razia di beberapa ruas jalan di wilayah Sumsel untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas guna meningkatkan pendapatan daerah bagi industri pajak kendaraan bermotor.

**B. METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filosofi, yang digunakan atau diinterpretasikan untuk mempelajari dan memahami kondisi alamiah subjek, dimana sudut pandang peneliti adalah instrumen utama, dan teknik pengumpulan data dilakukan menurut triangulasi metode (Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Bapenda Provinsi Sumsel. Peneliti memilih lokasi di Bapenda Sumsel beralamatkan di Jalan POM IX, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137.

Tabel 3  
Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Indikasi
Capaian Tujuan	1. Periode Program 2. Tepat Sasaran

Fokus Penelitian	Indikasi
Integrasi	1. Sosialisasi Program 2. Instansi Terkait (Afiliasi)
Adaptasi	Penyesuaian Program

Sumber: diadaptasi dari teori Richard M Steers

**C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2021. Analisis Teori Richard M. Steers Terdiri dari 3 Dimensi Indikator yaitu:

1. Fokus Penelitian Capaian Tujuan dengan indikator Periode Program dan Sasaran Program.
2. Fokus Penelitian Integrasi dengan indikator Sosialisasi dan Afiliasi.
3. Fokus Penelitian Adaptasi dengan indikator Penyesuaian

Fokus penelitian pencapaian tujuan adalah bahwa semua langkah organisasi menuju pencapaian tujuan harus dipahami sebagai suatu bentuk proses. Oleh karena itu, untuk menjamin tercapainya tujuan akhir diperlukan tahapan-tahapan, baik menurut tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun menurut periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang

merupakan target kongkret dalam pencapaian tujuan suatu organisasi, sebagai berikut:

### Periode Program

Suatu program disahkan dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu proses yang memakan waktu, maka dari itu peneliti akan menjabarkan data didapat dilapangan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor di provinsi sumatera selatan setiap tahunnya berjalan dengan kurun waktu berbeda dari tiga tahun terakhir dari data yang didapat dapat dilihat di Tabel 4.

Tabel 4  
Periode Program Pemutihan Pajak  
Kendaraan Bermotor Provinsi  
Sumsel dari tahun 2020 – 2022

Tahun	Periode Program	
	Bulan	Keterangan
2020	5 Bulan	01 Agustus – 31 Desember
2021	3 Bulan	01 Oktober – 31 Desember
2022	5 Bulan	01 Agustus – 31 Desember

Sumber: Bapenda Provinsi Sumsel, 2022

Hal ini diperkut dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Sumsel, Bapak Dimas Firmansyah, S.STP, MM pada hari Senin 16 April 2022 pukul 10.30 Wib.

*“Biasanya program memakan waktu tiga bulan pelaksanaan kadang juga empat bulan pelaksanaan. program pemutihan*

*pajak kendaraan bermotor ini sesuai arahan gubernur sumatera selatan dan di sahkan dalam pergub Sumsel Nomor 9 tahun 2021 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, karena kita tau sendiri penduduk sumsel tidak sedikit sehingga 3 bulan cukup untuk mereka melakukan pembayaran”.*

Hasil wawancara dengan Ibu Meyti Sukarni, (35) tahun selaku masyarakat kota Palembang, pada Sabtu 23 April 2022 pukul 13.00 Wib:

*“Pertama kali mengetahui adanya program pemutihan pajak dari info grub whatsapp, lumayan tiga bulan cukup terbantu disaat ekonomi keluarga lagi susah, mau tidak mau memang pajak kendaraan harus tetap hidup, karena suami saya kerjanya jauh dari rumah, takut kalo pajak mati kena tilang dijalan ”*

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan dari program pemutihan pajak ini cukup membantu masyarakat karena waktu pelaksanaannya 3 bulan ditahun 2021, karena dari hasil dilapangan, masyarakat kota Palembang sendiri banyak yang bekerja sebagai karyawan yang mana hari hari kerja mereka tidak ada waktu untuk mengurus pajak, namun karena program ini berlangsung 3 bulan, masyarakat dapat meluangkan

waktu satu hari bagi mereka yang bekerja untuk mengurus pajak kendaraan mereka.

**Sasaran**

Merupakan target mutlak dalam pencapaian tujuan program kebijakan sebuah organisasi. Hasil Penelitian Efektivitas Program Pemutihan PKB data didapat bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumsel sudah tepat sasaran.

Tabel 5

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021

Objek	Target	Realisasi
<b>PKB</b>	958.536.913.450	1.050.864.360.960
<b>BBN-KB</b>	865.679.168.000	957.251.353.845
<b>JUMLAH</b>	1.824.216.081.450	2.008.115.714.805

Sumber: Bapenda Provinsi Sumsel, 2022

Tujuan penelitian pendekatan terpadu adalah mengukur kemampuan organisasi untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan mengembangkan konsensus dalam komunitas. Integrasi melibatkan proses sosialisasi di lapangan. dan afiliasi yang baik guna untuk melancarkan jalan nya suatu program kebijakan

**Sosialisasi**

Sebuah proses pelaksanaan program, sosialisasi terhadap masyarakat merupakan unsur

penting agar program tersebut mencapai tujuan. Hasil Penelitian Efektivitas Program Pemutihan PKB data didapat bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumsel sudah melakukan pensosialisasian program dengan baik.



Gambar 1. Sosialisasi Program Pemutihan dilapangan  
Sumber: diolah oleh Penulis, 2022





Gambar 2. Sosialisasi Program Pemutihan PKB melalui Media Sosial

Sumber: diolah oleh Penulis, 2022

### Afiliasi

Suatu program agar dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dibutuhkan nya hubungan yang bersinergi antar instansi terkait. Hasil Penelitian Efektivitas Program Pemutihan PKB data didapat bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumsel sudah melakukan Afiliasi dengan baik.



Gambar 3. Rapat Koordinasi Bapenda dan Ditlantas Polda Sumsel  
Sumber: diolah oleh Penulis, 2022

### Adaptasi

Adalah kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sebagai bagian dari relevansi pelaksanaan program dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Hasil penelitian tentang efektivitas program cuci PKB menunjukkan bahwa program pajak kendaraan bermotor provinsi Sumatera Selatan telah menyesuaikan program dengan sangat baik. Pasalnya, Ditlantas sebagai organisasi yang bermitra dengan Bapenda telah menggelar operasi razia di beberapa ruas jalan di wilayah Sumsel untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas guna meningkatkan pendapatan daerah bagi industri pajak kendaraan bermotor.



Gambar 4. Operasi Zebra Ditlantas tahun 2021  
Sumber: diolah oleh Penulis, 2022

Tabel 6  
Rekapitulasi Hasil Penelitian

Aspek	Hasil Penelitian
1. Periode	- Program pemutihan pajak ini berjalan dengan baik dalam membantu masyarakat karena waktu pelaksanaannya 3 bulan ditahun 2021. Dan keberlanjutan dari program ini perlu diadakan mungkin bisa setiap tahun yang sebagaimana fungsinya yaitu merupakan bentuk bantuan keringanan dari pemerintah kepada masyarakat. - Hasil penelitian dilapangan belum dapat dikatakan secara maksimal tepat sasaran karena dari sektor penerimaan pajak kendaraan roda dua hanya terealisasi 3% pada tahun anggaran 2021.
2. Sasaran	
1. Sosialisasi	- Pensosialisasian telah terlaksana dengan baik karena di era serba digital seperti sekarang sangat memudahkan untuk melakukan sosialisasi. - Sinergi dari semua aspek yang terkait perlu dijalin agar afiliasi dapat berjalan dengan baik.
2. Afiliasi	
Penyesuaian	- Bentuk dari penyesuaian tersebut yaitu melakukan koordinasi dengan pihak polantas selaku dilapangan untuk melakukan operasi

Aspek	Hasil Penelitian
	kepatuhan di beberapa titik lalu lintas guna merazia kendaraan yang tidak taat bayar pajak.

#### D. Kesimpulan dan Saran

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data dilapangan yang sudah disajikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumsel No 9 tahun 2021 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2021. Diukur atau dilihat melalui teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M Steers, maka diperoleh, [1]

**Pencapaian Tujuan.** Program pemutihan PKB dilaksanakan dengan baik berdasarkan jangka waktu program yang berlangsung sekitar 3 bulan. Dan bisa dikatakan benar tepat sasaran, karena misi dari program ini sendiri adalah bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat. [2] **Integrasi.** Sudah terintegrasi dengan baik dsn sesuai dengan ketentuan oleh badan pendapatan daerah karena pensosialisasian program dilakukan dengan memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana sosialisasi program, dan dengan koordinasi yang terus dijalin agar afiliasi berjalan dengan

baik tanpa hambatan. [3] **Adaptasi**. Koordinasi dengan pihak polantas bapenda menggelar operasi kepatuhan guna merazia kendaraan yang masih tidak taat pajak sebagai bentuk penyesuaian terhadap program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

### Rekomendasi/Saran

1. Pihak terkait wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota Palembang secara luas lagi dan detail agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pajak dan pemutihan pajak.
2. Diadakan nya Operasi – Operasi Kepatuhan di Beberapa Titik Lalu Lintas, Guna Merazia Kendaraan yang Tidak Taat Bayar Pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Athoriq, & Irfan, M. (2021). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16220>
- Dewi, N. K. A. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(1), 1–30. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p01>
- Efriandy, I., Rahmawati, M., & Donata, E. O. (2020). Kajian Komparatif Sebelum Dan Pasca Launching Samsat Keliling Dan Samsat Corner Mall Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Selatan. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 123–131. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i2.1062>
- Fajriana, I., & Fachrunissa, H. (2022). Analisis Pelaksanaan Dan Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Palembang (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan .... *Forbiswira Forum Bisnis Dan ...*, 12(1), 121. <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/forbiswira/article/view/3276%0Ahttps://jurnal.mdp.ac.id/index.php/forbiswira/article/download/3276/954>
- Hermawan, H. (2017). Efektivitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 150–167. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Khoiriyah, N., & Puspita, A. F. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1), 1–13. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/7095/6116>
- Pertiwi, I., Sari, M., Astika, Y. W., Tinggi, S., Administrasi, I., Setio, S., Bungo, M., & Indonesia, J. (2021). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BA-TUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo). *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(2), 122–136. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2171/1109>
- Rachman, S. R., & Alkamil. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. *SIGMA: Journal of Economic and Business*, 3(2), 42–55. <http://www.journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb/article/view/69/57>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.